



**BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**POLITEKNIK KELAUTAN DAN
PERIKANAN BONE**

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
(POLITEKNIK KP) BONE**

TAHUN 2020 - 2024



**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum Politeknik KP Bone	3
C. Potensi	5
D. Permasalahan	7
E. Lingkungan Strategis	8
F. Isu-isu Strategis	9
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi	11
B. Misi	11
C. Tujuan	12
D. Sasaran Strategis	13
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	16
B. Arah Kebijakan Badan Riset dan SDM KP	27
C. Arah Kebijakan Pusat Pendidikan KP	36
D. Arah Kebijakan Pengembangan Politeknik KP Bone	38
E. Kerangka Regulasi	41
F. Kerangka Kelembagaan	42
BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. Target Kinerja	44
B. Kerangka Pendanaan	46
BAB V. PENUTUP	48
LAMPIRAN	

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab :

Direktur Politeknik KP Bone

Tim Pelaksana :

Ketua : Pembantu Direktur I

Sekretaris : Pembantu Direktur II

Anggota : 1. Pembantu Direktur III
2. Kepala Satuan Penjamin Mutu dan Manajemen Representatif
3. Kepala Satuan Pengawas Internal
4. Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan
5. Kepala Subbagian Umum
6. Ketua Program Studi Teknik Penangkapan Ikan
7. Ketua Program Studi Teknik Budidaya Perikanan
8. Ketua Program Studi Teknik Kelautan
9. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha
11. Kepala Urusan Keuangan



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

Alamat :

Jln. Sungai Musi Km. 9, Tanete Riattang Timur, Watampone

Kab. Bone, Prop. Sulawesi Selatan Kode Pos 92718

Email: poltekkp.bone@gmail.com

LAMAN: <https://poltekkpbone.ac.id>



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

JALAN SUNGAI MUSI KM. 9, WATAMPONE – BONE – SULAWESI SELATAN 92718

TELEPON (0481) 2920204 FAKSIMILI (0481) 2920204

LAMAN: www.kkp.go.id/brsdm/poltekbone POS ELEKTRONIK: poltekkp.bone@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE
NOMOR: 065 /BRSDM-POLTEK.BN/RC.221/V/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan visi dan misi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan serta mengoptimalkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PER-BRSDM.4/2019 tentang Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PER-BRSDM.4/2018 tentang Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 perlu dijabarkan kedalam rencana strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone tentang Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;

3. Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone periode 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Politeknik KP Bone adalah dokumen perencanaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone adalah satuan Pendidikan yang berada dibawah Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pusat dalam penyusunan program kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan.
- (2) Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Kelautan dan Perikanan Bone ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, meliputi:

- a. pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi, permasalahan, dan lingkungan strategis, isu-isu strategis;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;

- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan, kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Renstra Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman indikator kinerja Pendidikan KP, indikator kinerja kegiatan eselon III bagi unit kerja di lingkungan Pusat terdiri dari indikator kinerja program Pendidikan KP, indikator kinerja kegiatan unit pelaksanaan teknis dan unit eselon III dan IV lingkup Pusat, serta kerangka pendanaan, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone ini.

Pasal 5

Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bone
pada tanggal 21 Mei 2020

A/ H. DIR. POLITEKNIK KELAUTAN
DAN PERIKANAN BONE



Muhammad Prihajatno, S.Pd, M.Eng)

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK KP BONE
NOMOR:065/BRSDM-POLTEK.BN/RC.221/V/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK
KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE TAHUN 2020-
2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Renstra Politeknik KP Bone) dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dijelaskan tugas Politeknik KP Bone yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Renstra Politeknik KP Bone merupakan penjabaran dari Renstra Pusat Pendidikan KP yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 195/PER-BRSDM.4/2020 tentang Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Pendidikan KP di Politeknik KP Bone Tahun 2020 – 2024. Keberadaan Politeknik KP Bone memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi Pusat Pendidikan KP (Pusdik KP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), KKP dan Pemerintah melalui kegiatan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

2. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku utama.
3. Mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri sehingga semua lulusan dapat berkarya baik bekerja di DUDI dan menjadi wirausaha yang handal.
4. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Pembentukan Politeknik KP Bone selaras dengan pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana peran riset dan Iptek sangat dibutuhkan masyarakat. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai lompatan inovasi telah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dunia harus dimanfaatkan sektor kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya masyarakat pemanfaat untuk mendorong akselerasi pertumbuhannya. Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi

antara *physical system*, komputasi dan juga *network/komunikasi*, sedangkan *society 5.0* merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber-physical-human systems*. Pada era *society 5.0* manusia tidak hanya dijadikan obyek (*passive element*), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama *physical system* dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Pemenuhan atas hal tersebut semakin relevan maknanya di tengah derasnya arus globalisasi yang membuat persaingan semakin kompetitif. Situasi ini memberikan peluang bagi Politeknik KP Bone untuk berimprovisasi dalam hal tersedianya SDM lulusan pendidikan KP yang kompeten bagi dunia usaha dan industri serta terciptanya lapangan usaha baru melalui kewirausahaan.

B. Kondisi Umum Politeknik KP Bone

Kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan secara umum bertujuan menyediakan tenaga terdidik yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan sesuai standar kebutuhan dan prioritas nasional untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan dan program nasional. Untuk optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan, meliputi :

1. Pengembangan Sistem Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
2. Penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan dengan pendekatan TEFA;

3. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan aparatur;
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan;
6. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
7. Pelaksanaan forum pendidikan kelautan dan perikanan;
8. Pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan;
9. Penguatan satuan pendidikan sebagai penjurur (*Center of Excellence*);
10. Pengembangan bidang kemaritiman dan penguatan bidang perikanan di satuan pendidikan lingkungan KKP; dan
11. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan vokasi KP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, maka Politeknik KP Bone dalam melaksanakan kelompok kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan harus menjalankan fungsinya yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
5. Pengembangan sistem penjaminan mutu;
6. Pelaksanaan pembinaan karakter;
7. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;

8. Pengelolaan kesejahteraan taruna, dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
9. Pelaksanaan pengawasan internal;
10. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan
11. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, evaluasi, dan pelaporan.

C. Potensi

Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Politeknik KP Bone melalui proses belajar dengan pendekatan teaching factory yang menerapkan 60–70% praktek dan 30–40% teori tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut setiap tahunnya akan lebih dilengkapi lagi sesuai dengan kebutuhan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Politeknik KP Bone dapat dilihat pada tabel berikut.

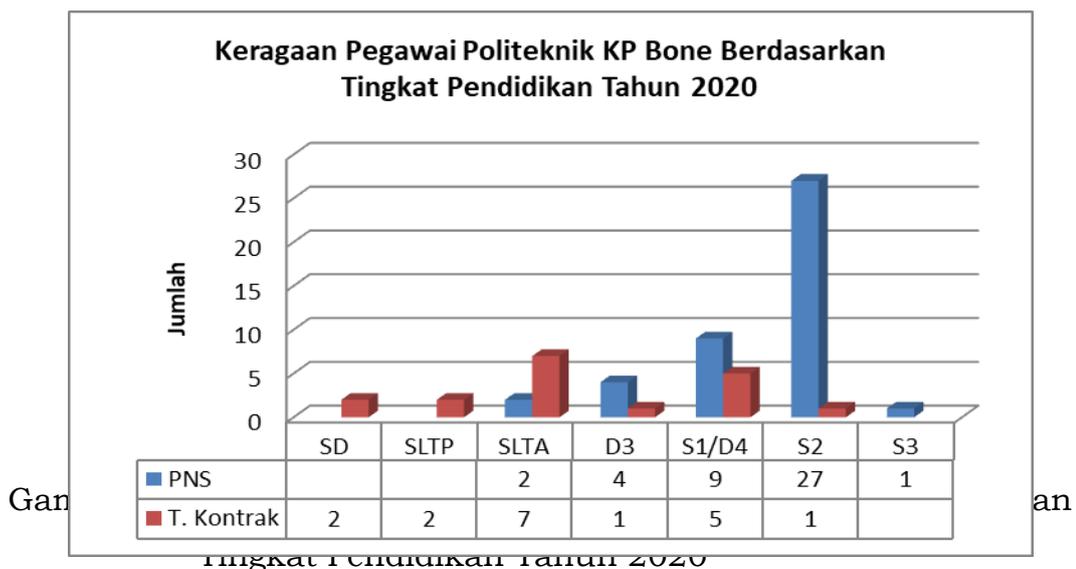
Tabel 1. Aset Politeknik KP Bone Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Barang konsumsi	109.658.782
2	Bahan untuk pemeliharaan	0
3	Suku cadang	350.000
4	Bahan baku	0
5	Persediaan lainnya	26.575.168
6	Tanah	71.460.980.000
7	Peralatan dan mesin	11.979.843.489
8	Gedung dan bangunan	36.576.696.523
9	Jalan dan jembatan	4.356.807.785
10	Irigasi	6.789.149.929
11	Jaringan	1.627.630.000
12	Aset tetap lainnya	130.668.743
13	Konstruksi dalam pengerjaan	78.760.000

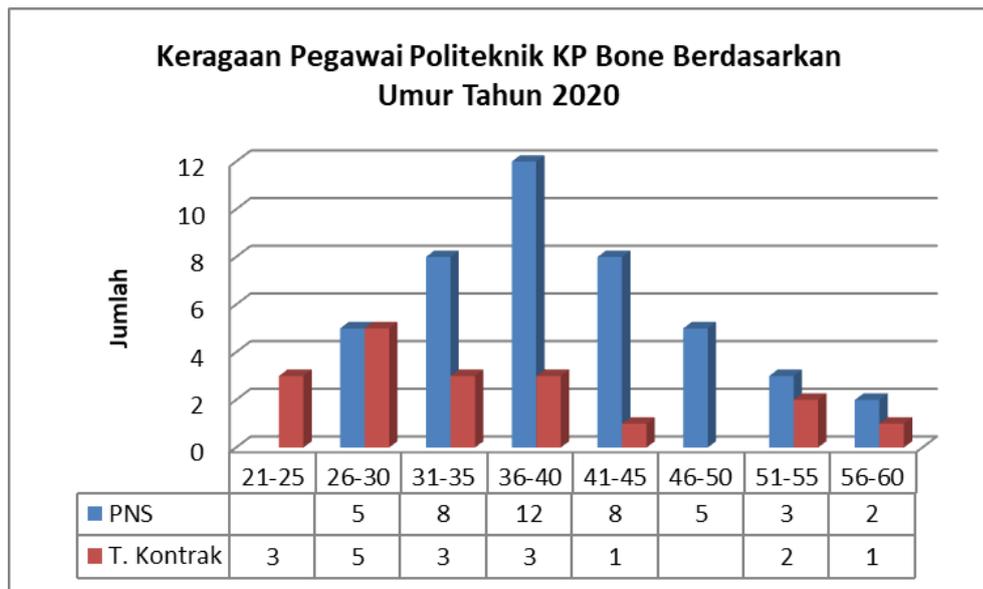
No	Uraian	Jumlah (Rp)
14	Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.333.095.519)
15	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(3.130.371.973)
16	Akumulasi penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.960.563.501)
17	Akumulasi penyusutan irigasi	(2.059.545.892)
18	Akumulasi penyusutan Jaringan	(183.108.375)
19	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	123.889.985
20	Akumulasi penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(121.208.862)
	Jumlah	128.064.762.117

Sumber : Politeknik KP Bone (2020)

Selain dukungan sarana dan prasarana, hal lain yang menjadi faktor penentu keberhasilan program pendidikan di Politeknik KP Bone yaitu dukungan sumber daya manusia. Politeknik KP Bone didukung SDM tercatat sebanyak 43 orang PNS dan 18 orang tenaga kontrak. Persentase SDM yang bekerja di lingkup Politeknik KP Bone berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut :



Adapun keragaan pegawai Politeknik KP Bone berdasarkan kelompok umur dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2. Keragaan Pegawai Politeknik KP Bone Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

Berdasarkan data yang ada, maka secara keseluruhan dari segi tingkat pendidikan baik PNS dan Tenaga Kontrak yang mendominasi adalah pendidikan S2 dengan jumlah keseluruhan 29 orang dari total jumlah pegawai sebanyak 61 orang. Sedangkan dari segi kelompok umur dapat disimpulkan bahwa pegawai Politeknik KP Bone umumnya masih pada usia produktif dimana kelompok umur pegawai Politeknik KP Bone umumnya masih diumur 26-45 tahun.

D. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi Politeknik KP Bone dalam pelaksanaan program Pendidikan Kelautan dan Perikanan guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan
 - Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran belum memenuhi standar pendidikan tinggi (SNPT);
2. Penyelenggaraan penelitian

- Kapasitas dosen dalam mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal bereputasi masih rendah;
 - Dana penelitian yang tersedia belum mencukupi kebutuhan anggaran usulan yang diajukan oleh dosen;
 - Belum optimalnya jejaring kerjasama riset antar lembaga, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
- Kurangnya penerapan hasil penelitian terapan di bidang teknologi tepat guna terhadap masyarakat pelaku utama belum optimal;
4. Penjaminan mutu
- Penerapan standar ISO 9001 :2015 belum optimal;
 - Penerapan sistim penjaminan mutu internal belum melembaga
5. Pengawasan internal
- Fungsi unit pengawasan internal belum optimal;
 - Tenaga auditor internal belum berfungsi.
6. Pembinaan karakter Taruna
- Jumlah tenaga terlatih bidang bimbingan konseling belum mencukupi;
 - Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan fisik, mental, dan disiplin yang preventif.
 - Pembinaan karakter taruna melalui kegiatan kerohanian perlu ditingkatkan.
7. Pembinaan sivitas akademik dan hubungan dengan lingkungan
- Penataan lingkungan kampus belum berdasarkan estetika lingkungan;
 - Sarana kebersihan dan sanitasi lingkungan perlu ditata dengan baik.
8. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya

- a. Tenaga administrasi dan tenaga penunjang ketersediaannya belum optimal;
- b. Sumber referensi perpustakaan yang masih sedikit;
- c. Sarana dan prasarana pada tiap unit/instalasi pembelajaran belum tersedia secara optimal.

E. Lingkungan Strategis

Politeknik KP Bone yang berada di wilayah kawasan pesisir Teluk Bone, secara sadar mencermati perubahan yang terjadi di kawasan ini. Perubahan itu adalah adanya tuntutan kehidupan yang berkualitas tinggi. Masyarakat pada berbagai level kehidupan menuntut adanya perbaikan pada mutu pelayanan, produk barang dan jasa, dan sistem. Tuntutan kehidupan yang berkualitas tersebut tidak terlepas dari perubahan lingkungan, baik lingkungan global dan lingkungan lokal kawasan itu sendiri.

Faktor-faktor yang terkait dengan tuntutan kehidupan berkualitas tersebut adalah ketersediaan SDM yang kompeten pada berbagai level bidang kerja dan sistem pelayanan, serta bekerjanya sistem pembangunan secara efisien. Terhadap kecenderungan perubahan lingkungan tersebut, utamanya pada bidang kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Selatan perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:

- Wilayah Sulawesi Selatan merupakan prioritas tinggi pada pembangunan kelautan dan perikanan;
- Potensi lestari sumberdaya ikan perairan teluk Bone cukup melimpah, tetapi tingkat pemanfaatannya belum optimal;
- Kondisi sosial ekonomi, ketrampilan teknis, manajemen, dan modal masih rendah; dan
- Struktur usaha penangkapan ikan didominasi oleh level skala kecil.

F. Isu-isu Strategis

Politeknik KP Bone memiliki peran untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan KP. Dalam merespon segala isu yang berkembang, keberadaan Politeknik KP Bone berperan sangat penting. Beberapa isu strategis yang memerlukan kontribusi dari Pendidikan KP, yaitu :

1. Terkait peningkatan kompetensi SDM, Politeknik KP Bone menyelenggarakan pendidikan KP dengan sistem pendidikan vokasi yang menerapkan sistem pembelajaran *teaching factory*.
2. Adanya pengembangan kurikulum yang mengarahkan peserta didik untuk menjadi entrepreneurship bidang kelautan dan perikanan pada satuan pendidikan KP. Hal ini menjadi dorongan bagi Politeknik KP Bone untuk menyiapkan peserta didik dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan yang bersifat wirausaha untuk merangsang mereka agar dapat merubah pola pikir menjadi wirausaha muda. Hal ini didukung dengan pelaksanaan sistem pembelajaran *teaching factory* di Politeknik KP Bone.
3. Pengembangan *networking* berupa penciptaan dan penguatan jaringan kerja baik secara internal maupun eksternal lintas sektor maupun dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelesaian masalah serapan lulusan.
4. Adanya upaya pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam mengembalikan kejayaan budidaya udang windu di Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu isu strategis dan menjadi peluang bagi Politeknik KP Bone untuk mengambil bagian didalamnya.
5. Program Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan rehabilitasi mangrove disepanjang pesisir pantai yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu isu yang menjadi tantangan bagi Politeknik KP Bone untuk berperan dalam mensukseskan program tersebut baik dari segi keterlibatan langsung ataupun menyiapkan bahan baku berupa

penyediaan bibit mangrove sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di Politeknik KP Bone.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Visi Politeknik KP Bone pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi Pusat Pendidikan KP yaitu “Mencetak SDM KP yang unggul melalui kegiatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan berkualitas guna Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

B. Misi

Visi Politeknik KP Bone tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Politeknik KP Bone sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasional berbasis kompetensi dengan pendekatan *teaching factory* di bidang industri kelautan dan perikanan bertaraf internasional sesuai dengan konvensi *Standard Of Training Certificate and Watchkeeping – Fishing vessel personal* (STCW-F) dan *Code of Conduct for Responsibility Fisheries* (CCRF) dan Undang-Undang yang berlaku;
2. Menyelenggarakan penelitian terapan di bidang kelautan dan perikanan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
4. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan bidang kelautan dan perikanan;
5. Menyelenggarakan sistem pendidikan taruna yang berbasis *character building* dengan pendekatan kekeluargaan;
6. Mengembangkan strategi, sarana dan prasarana pembelajaran berstandar Internasional;
7. Meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, inovatif dan berkarakter;
8. Menjalinkan kerjasama dengan seluruh *stakeholders*;

9. Mewujudkan kampus Politeknik KP yang aman, indah dan ramah lingkungan;
10. Melaksanakan pengadministrasian dan mempertahankan Manajemen Mutu sesuai standar ISO 9001:2015.

C. Tujuan

Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Politeknik KP Bone dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2024. Tujuan Politeknik KP Bone tersebut telah tertuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone yaitu :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, berdaya saing tinggi, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan serta unggul di bidang industri kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory*;
2. Melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan;
4. Membangun jiwa kewirausahaan di kalangan civitas akademika yang menumbuh kembangkan sektor industri bidang kelautan dan perikanan;
5. Mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Politeknik KP Bone dengan memperhatikan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusat Pendidikan KP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP adalah sebagai berikut:

1. SS1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP
2. SS2 Tatakelola pemerintahan yang baik pada Pusat Pendidikan KP

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai Politeknik KP Bone pada tahun 2020-2024 mengacu pada sasaran strategis Pusat Pendidikan KP adalah sebagai berikut:

1. SS1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP
2. SS2 Tata kelola Pemerintahan yang baik pada Politeknik KP Bone

Menjabarkan misi sasaran strategis Pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP", dengan indikator kinerja:

1. Persentase lulusan Politeknik KP Bone yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan 75% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Persentase lulusan Politeknik KP Bone yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan 5% pada tahun 2020 menjadi 19% pada tahun 2024.
3. Lulusan Politeknik KP Bone yang bersertifikat kompetensi 82 orang pada tahun 2020 menjadi 240 orang pada tahun 2024.

4. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di Politeknik KP Bone 259 orang pada tahun 2020 menjadi 750 orang pada tahun 2024.
5. Sarana dan prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya Politeknik KP Bone 1 unit pada tahun 2020 menjadi 1 unit pada tahun 2024.
6. Jejaring dan/atau kerjasama Politeknik KP Bone yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti 1 Dokumen pada tahun 2020 menjadi 2 dokumen pada tahun 2024.
7. Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik di Politeknik KP Bone 50% pada tahun 2020 menjadi 75% tahun 2024.
8. Pendidik dan tenaga kependidikan Politeknik KP Bone yang meningkat kompetensinya 12 Orang pada tahun 2020 menjadi 12 orang pada tahun 2024.
9. Pengabdian pendidikan tinggi KP 1 Paket pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
10. Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di Politeknik KP Bone sebesar 80 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* Politeknik KP Bone melalui Sasaran strategis ke dua (SS-2) “Tata kelola Pemerintahan yang baik pada Politeknik KP Bone” dengan indikator kinerja” :

1. Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bone (Indeks) dengan target tahun 2020 sebesar 72 sampai dengan tahun 2024.
2. Persentase unit kerja Politeknik KP Bone yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dari 82% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

3. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bone (Nilai) dengan target Baik (88) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
4. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Politeknik KP Bone dibandingkan realisasi anggaran Politeknik KP Bone TA 2019 (%) sebesar 1 % setiap tahunnya dari 2020 sampai dengan tahun 2024.
5. Nilai kinerja anggaran Politeknik KP Bone (Nilai) 85 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Arah dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Arah kebijakan ini menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kontribusi Ekonomi sektor KP (DJPT)
2. Mongoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan kontribusi ekonomi sektor KP. (DJPDS, BKIPM).
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (PRL,PSDKP dan BKIPM).

5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Arah kebijakan menjabarkan misi KKP yang terkait dengan Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Inovasi Riset

Untuk mencapai 5 arah kebijakan diatas, KKP melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Hal ini menjabarkan misi KKP terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas adalah:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
 - b. Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait
 - c. Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - d. Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas
 - e. Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP
 - f. Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan

- usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project RPJMN) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah.
- g. Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan
 - h. Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
 - i. Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan
 - j. Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs)
 - k. Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, Sertifikasi tanah nelayan
 - l. Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital
 - m. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - n. Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap;
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Akselerasi produk perikanan budidaya, ektensifikasi lahan budidaya;
 - b. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN) berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air laut, payau dan tawar
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias, rumput laut, lobster

- e. Pengembangan pakan mandiri, pakan dari magot
 - f. Pembangunan fasilitas perbenihan, produksi induk unggul dan benih bermutu
 - g. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
 - h. Pengembangan kesehatan lingkungan budidaya dan pengujian residu produk perikanan budidaya untuk sertifikasi untuk ekspor
 - i. Pelaksanaan sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
 - j. Pembangunan dan penguatan sarana dan prasarana perikanan budidaya antara lain Balai Benih Ikan, unit perbenihan, dan Broodstock center.
 - k. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, keramba jaring apung dan lain-lain
 - l. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
 - m. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah, fasilitasi usaha dan investasi, dan sinergi perizinan dengan instansi terkait.
 - n. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - o. Penguatan UPT perikanan budidaya
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Perbaiki kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan;
 - b. Meningkatkan produksi, produktifitas, standardisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;

- c. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan, Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
- d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, penguatan daya saing Unit Pengolah Ikan (UPI);
- e. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
- f. Peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
- g. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi stunting.
- h. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan branding produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
- i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan, Pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (Mayor Project) K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
- j. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri
- k. Peningkatan Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
- l. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan

- m. Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP,
 - n. Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*
 - o. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan peralatan pengolahan
 - p. Peningkatan Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
 - q. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi, pembiayaan, teknologi dan pasar dan didukung regulasi yang kondusif;
 - r. Pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan
 - s. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (*traceability*), peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu
 - t. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - u. Penguatan UPT mutu hasil perikanan dan karantina ikan
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Pengelolaan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan secara berkelanjutan termasuk penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - b. Peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan
 - c. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan

- d. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
- e. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional, ekstensifikasi dan intensifikasi lahan garam, peningkatan kualitas garam
- f. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
- g. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
- h. Penguatan kelembagaan, masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakui.
- i. Pengelolaan Biofarmakologi dan peningkatan pemanfaatan marine bioproduct dan bioteknologi, pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.
- j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
- k. Pengelolaan dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir, Penyusunan RZ kawasan, KSN, KSNT yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi pengelolaan ruang laut
- l. Penyelesaian rencana zonasi laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil, termasuk penyesuaian RZWP3K dan RTRW Provinsi;
- m. Pemberantasan IUU Fishing dan destructive fishing;
- n. Operasi armada pengasawan SDKP, operasional kapal pengawas, speed boat/RIB/rubber boat pengawas, operasi pencegahan (intercept) secara terintegrasi, kerjasama operasi pengawasan di laut;
- o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
- p. Penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, penguatan Satgas pemberantasan Illegal Fishing.
- q. Pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa kepatuhannya

- r. Penyadartahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - s. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - t. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri, sinergi pengawasn lalu lintas ikan, pelayanan tindak karantina di entry dan exit point serta pos lintas batas (gateway) wilayah perbatasan
 - u. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan dan karantina ikan
 - v. Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - w. Peningkatan UPT Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Penguatan kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh masyarakat, inovasi teknologi dan riset kemaritiman, kelautan dan perikanan, serta peningkatan *database* kelautan dan perikanan
 - b. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset, diseminasi teknologi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan produktif,
 - c. Pengembangan/pembentukan pusat unggulan riset kelautan dan perikanan;
 - d. Pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, termasuk yang berbasis digital;
 - e. Pengembangan kewirausahaan perikanan, pengembangan angkatan kerja perikanan generasi milenial, peningkatan daya saing SDM kelautan dan perikanan melalui diklat agar dapat terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan), penguatan literasi maritim;

- f. Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikasi kompetensi
- g. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
- h. Penguatan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan
- i. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- j. Peningkatan UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan Pengarustamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Gender;
3. Modal Sosial Budaya;
4. Transformasi Digital.

Pengarustamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

- a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh.

Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water yang mencakup diantaranya (1) mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut, (2) mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, (3) meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, (4) mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan, (5) melestarikan wilayah pesisir dan laut, (6) mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih, (7) meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan, (8) meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, (9) menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir, dan (10) meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat.

(b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; (g) Pembuatan profil gender; (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari, dan (3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek

pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (on-line), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) KKP dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.

B. Arah Kebijakan Badan Riset dan SDM KP

Arah kebijakan BRSDM KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP yang ada. Berdasarkan penjabaran strategi pembangunan KP 2020 – 2024, strategi penguatan daya saing SDM, inovasi teknologi dan riset merupakan prioritas utama BRSDM KP yang diperoleh dari hasil analisis SWOT. Upaya yang akan dilaksanakan untuk memenuhi hal tersebut diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan riset untuk menyelesaikan isu dan permasalahan.
2. Meningkatkan peran riset serta inovasi teknologi dalam mendukung percepatan pembangunan kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan diseminasi hasil riset sesuai dengan upaya pengembangan industri kelautan dan perikanan.
4. Membangun hubungan melalui jaringan kemitraan dalam kerangka kerjasama riset dan industri.
5. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

6. Meningkatkan kompetensi ASN KP yang unggul dan berdaya saing global.
7. Membangun sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan berbasis digital.
8. Membangun sistem penyuluhan yang bersinergi dengan riset dan pengembangan SDM.
9. Memperkuat kelembagaan dan manajerial riset dan SDM.

Adapun arah kebijakan pada bidang Riset KP dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu:

a. Arah Kebijakan Riset KP

Arah riset BRSDM pada periode 2020-2024 diarahkan untuk menghasilkan inovasi riset dan teknologi yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Sepuluh fokus kegiatan riset kelautan dan perikanan yang dilaksanakan di BRSDMKP adalah: 1) *Sustainable fisheries*; 2) Konservasi dan mitigasi serta rehabilitasi; 3) *Sustainable aquaculture*; 4) Inovasi teknologi; 5) Perubahan iklim; 6) *Poverty reduction* dan pemberdayaan masyarakat; 7) Jasa kelautan; 8) Pengembangan usaha, sistem bisnis dan trading; 9) Kemandirian pangan dan bahan baku industri; dan 10) Kajian kewilayahan dan geopolitik. Berdasarkan fokus program tersebut, BRSDMKP menetapkan kebijakan alokasi sumberdaya riset menurut fokus bidang dan kewilayahan.

Tabel 2. Fokus Program BRSDMKP

Kelompok Sumberdaya Ikan	Usaha Perikanan	Kewilayahan	WPP
1. Pelagis besar	1. Perikanan tangkap	1.Indonesia Bagian Barat	1. WPPNRI 571
2. Pelagis kecil			2. WPPNRI 572
3. Demersal	2. Perikanan budidaya	2.Indonesia Bagian Tengah	3. WPPNRI 573
4. Karang konsumsi	3. Perikanan perairan umum	3.Indonesia Bagian Timur	4. WPPNRI 711
5. Udang			5. WPPNRI 712
			6. WPPNRI 713

penaeid	daratan		7. WPPNRI 714
6. Lobster	4. Pegaraman		8. WPPNRI 715
7. Cumi-cumi	5. Pengolahan perikanan		9. WPPNRI 716
			10. WPPNRI 717
			11. WPPNRI 718

Topik riset kelautan dan perikanan:

- (1) Modernisasi dan Penguatan Integrasi Hulu Hilir Perikanan Tangkap, Aquaculture dan Industri Pengolahan;
- (2) Klaster Komoditas Unggulan Berbasis Kewilayahan;
- (3) Daya Saing dan Nilai Tambah Industri KP;
- (4) Revitalisasi Peran Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Petambak Garam;
- (5) Dukungan Program Kesejahteraan;
- (6) Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP;
- (7) Pengelolaan Zonasi, Tata Ruang Laut dan Batas Maritim;
- (8) Tata Kelola Sumberdaya Kelautan Perikanan;
- (9) Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, dan Pencegahan Pencemaran Laut;
- (10) Konservasi Laut dan Keanekaragaman Hayati dan Jasa kelautan;
- (11) Ekonomi dan Budaya Maritim;
- (12) Perdagangan Internasional.

Kebijakan riset kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kegiatan riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan difokuskan pada aspek-aspek keamanan pangan dan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis bioteknologi, peningkatan kualitas dan nilai tambah, serta sistem, model, dan kebijakan teknis industri pengolahan hasil perikanan. Riset Keamanan pangan dan lingkungan untuk mendukung jaminan mutu dan keamanan produk perikanan dan lingkungannya yang

meliputi standar mutu keamanan produk perikanan, bahan tambahan pangan, pengembangan tes kit uji cemaran pada produk perikanan, kajian resiko cemaran pada produk perikanan, serta riset kualitas perairan dan lingkungan industri perikanan. Riset pemanfaatan sumberdaya KP berbasis bioteknologi, dilakukan melalui riset biodiscovery biomolekul, bioproses dan rekayasa genetika. Ketiga riset bioteknologi tersebut diarahkan untuk menghasilkan produk prospektif KP yang bermanfaat dalam bidang nutrasetika, farmasetika, dan kosmetika.. Sedangkan peningkatan kualitas dan nilai tambah produk KP dilakukan melalui riset penanganan pascapanen, pengembangan produk-produk baru, pemanfaatan hasil samping menjadi produk inovatif yang berdaya saing serta pengembangan standar nasional Indonesia untuk produk olahan perikanan.

2. Riset sosial dan ekonomi KP terbagi menjadi dua kategori yaitu: (1). Riset yang berbasis Kelompok Peneliti (KELTI); dan (2). Riset yang berbasis institusi/organisasi kelembagaan riset sosial dan ekonomi KP. Riset ini bertujuan untuk menjawab tantangan dan isu terkini serta membantu tercapainya program-program andalan BRSDMKP. Kategori kedua ini akan menjadi ciri khas atau unifikasi institusi lembaga riset sosek melalui kegiatan Analisis Kebijakan (ANJAK) yang bersifat responsive dan antisipatif. Selain itu terdapat program yang fokus kepada pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, dan juga diharapkan merupakan sarana/kelembagaan untuk transfer teknologi, menilai kelayakan teknologi yang dihasilkan oleh BRSDMKP.
3. Klasifikasi riset mengacu ketentuan LIPI dikategorikan ke dalam riset dasar, riset terapan dan riset pengembangan experimental. Riset dasar adalah kegiatan riset yang bersifat eksploratif dan atau eksperimental untuk memperoleh ilmu

pengetahuan baru sebagai acuan bagi riset terapan perikanan. Riset terapan merupakan kegiatan riset yang memanfaatkan hasil riset dasar perikanan, dan diarahkan untuk tujuan praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi dibidang perikanan. Pengembangan eksperimental merupakan kegiatan sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada yang diperoleh melalui riset dasar perikanan dan atau riset terapan perikanan, untuk memperoleh sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan.

4. Riset bidang kelautan, perikanan, pengolahan produk dan bioteknologi KP disusun sesuai dengan tingkat kesiapan teknologinya (TKT). Untuk meningkatkan manfaat dan daya dukung hasil riset yang telah dilakukan, diperlukan pengembangan melalui peningkatan skala (scaling up) sebagai bagian dari uji adaptasi. Selanjutnya uji lapang bersama masyarakat diharapkan dapat memudahkan proses diseminasi dan asimilasi hasil inovasi kepada calon pengguna (stakeholder). Dari kegiatan riset dan pengembangan tersebut akan dihasilkan keluaran berupa data dan informasi, teknologi, dan rekomendasi, serta publikasi ilmiah.
5. Kegiatan hilirisasi lebih diarahkan untuk mengoptimalkan penyebaran hasil riset dan inovasi teknologi dalam memenuhi kebutuhan informasi penelitian, pengembangan, pengkajian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penerapan (litbangkajidilatluhrap) melalui: 1) pengembangan jejaring informasi; 2) pengembangan sumberdaya informasi; 3) adaptasi teknologi informasi sesuai perkembangan dan tuntutan pengguna; dan 4) pengelolaan dan penyebarluasan informasi dengan berbagai media.

b. Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM BRSDMKP pada periode 2020-2024 diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

1. Pendidikan KP

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pendidikan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan pendidikan, dan kelembagaan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan. Arah pendidikan KP yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory dibidang kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
4. Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan;
5. Meningkatkan kerjasama pendidikan dengan lembaga lain.

2. Pelatihan KP

Pelatihan kelautan dan perikanan diselenggarakan melalui pelatihan bagi masyarakat dan aparatur. Pelatihan bagi masyarakat ditujukan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pedagang ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Sedangkan diklat bagi aparatur ditujukan bagi aparatur negara yang memiliki peran, partisipasi dan kontribusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan, baik aparatur di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun aparatur di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Diklat aparatur terdiri dari diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan, yaitu diklat teknis, struktural, dan fungsional.

Kegiatan ini pada dasarnya lebih ditujukan bagi peningkatan kompetensi masyarakat KP agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha dan taraf kehidupannya. Pelatihan bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dan aparatur daerah yang membidangi kelautan dan perikanan., ditujukan untuk menyiapkan SDM aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial, serta sebagai fasilitator bagi kepentingan para pelaku utama. Arah pelatihan KP yang dilaksanakan antara lain :

- a. Mengembangkan Sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
- b. Melakukan akreditasi program dan lembaga pelatihan KP;
- c. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi SDM KP;
- d. Mengembangkan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan pelatihan kelautan dan perikanan;
- e. Mengembangkan metode pelatihan dengan pendekatan inkubator bisnis berbasis *digital talent* untuk menghasilkan *startup* di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka memperluas jangkauan layanan pelatihan (*online training*).

3. Penyuluhan KP

Kegiatan penyuluhan berdasarkan kepada metoda dan materi penyuluhan yang partisipatif dan inovatif dilaksanakan melalui :

- 1) Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok)
- 2) Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi)
- 3) Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan
- 4) Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Penataan kembali sistem penyelenggaraan penyuluhan, terutama pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dimana kewenangan penyelenggaraan penyuluhan menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan fokus kepada ketenagaan, kelembagaan, penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan dan sarana prasarana penyuluhan.

Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelompok kegiatan, meliputi:

- a. Pengembangan dan Penataan Kelembagaan dan Ketenagaan;
 - Peningkatan kelas kelompok mandiri
 - Percontohan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan pusat di daerah
 - Penempatan dan penyebaran penyuluh di sekretariat penyuluhan di kab/kota
- b. Peningkatan Kapasitas Penyuluh;
 - Peningkatan daya saing penyuluh PNS
 - Pengembangan dan pembinaan penyuluh perikanan bantu (PPB).

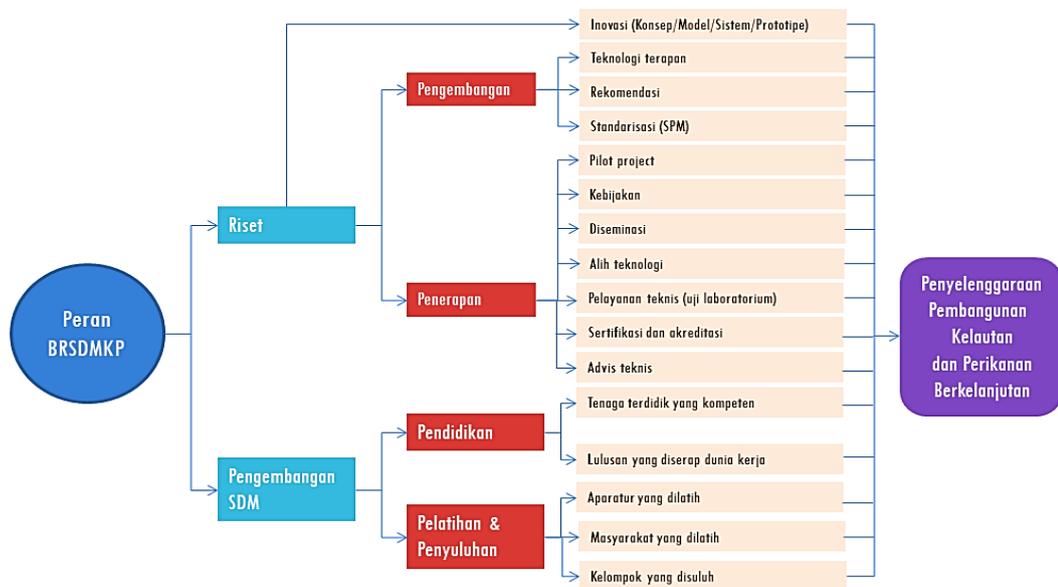
- c. Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan berbasis digital;
 - Pengembangan materi *cyber extention*
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas media penyuluhan berbasis inovasi dan teknologi
 - Pengembangan penyuluhan wilayah potensi perikanan (mapping)
- d. Pengembangan dan Penataan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - Penataan sarana dan prasarana penyuluhan
 - Pengelolaan Balai/Pos/Satker Penyuluhan
 - Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan
- e. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Penyuluhan
 - Pembinaan reorientasi penyuluh berbasis kinerja
 - Peningkatan sistem evaluasi dan monitoring penyuluh
 - Pengembangan sistem pengawasan penyuluhan interkoneksi

c. Sinergi Antar Lembaga lingkup BRSDM KP

Isu antar lembaga lingkup BRSDM KP merupakan kegiatan yang bersifat lintas kepakaran dan melibatkan berbagai institusi baik di dalam maupun luar BRSDM KP yang disusun secara tematik, komprehensif dan berbasis keilmuan. Kegiatan antar lembaga lingkup BRSDM KP dilaksanakan untuk: a) mendukung pencapaian target pembangunan KP yang sudah ditetapkan oleh KKP; b) pengembangan hasil inovasi IPTEK KP sebagai dasar pengambilan kebijakan; c) optimalisasi peran penyuluh dalam pendampingan pelaku utama untuk implementasi program-program KKP.

Inovasi teknologi hasil riset KP yang dikembangkan diujicobakan oleh peneliti di tingkat masyarakat melalui program IPTEK untuk Masyarakat (IPTEKMAS). Inovasi yang telah siap disebarluaskan, didiseminasikan ke pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dengan pendampingan intensif penyuluh

perikanan yang dilengkapi dengan sarana berlatih. Periode 2020–2024 telah diagendakan untuk membangun Desa Inovasi di Propinsi terpilih yang lokasinya akan ditentukan kemudian. Lingkup pengembangan dan penerapan IPTEK BRSDMKP disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Lingkup pengembangan dan penerapan IPTEK BRSDMKP

C. Arah Kebijakan Pusat Pendidikan KP

Arah kebijakan Pusat Pendidikan KP 2020-2024 mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan KP dan BRSDM KP 2020 - 2024 yang ada. Strategi penguatan daya saing SDM merupakan prioritas utama Pusdik KP yang diarahkan untuk menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing yang mendukung pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan kebijakan dan program, serta melaksanakan penyusunan pedoman, standar, bimbingan, monitoring, dan evaluasi tata penyelenggaraan, kebutuhan pendidikan, pengembangan dan pembinaan kelembagaan,

ketenagaan, penyelenggaraan pendidikan, dan kelembagaan tenaga pendidik di bidang kelautan dan perikanan. Arah kebijakan pendidikan KP yang dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan pendidikan kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory dibidang kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
4. Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan;
5. Meningkatkan kerjasama pendidikan dengan lembaga lain.
6. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan KP.

Arah kebijakan nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pusdik KP, adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, antara lain dengan:
 - a. pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;
 - b. pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerja sama dengan dunia usaha/industri;
 - c. pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi;
 - d. penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);

- e. peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan pendidikan vokasi;
 - f. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
 - g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan vokasi; dan
 - h. pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi.
 - i. perluasan akses pendidikan kepada pelaku utama
 - j. sertifikasi Kompetensi sesuai kebutuhan dan berkarakter (30% teori & 70% praktek)
 - k. wirausaha dan Tenaga Kerja Profesional
 - l. menjadikan satuan pendidikan KP Pusat Rujukan (Center of Excellence) pendidikan vokasi kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti.

D. Arah Kebijakan Pengembangan Politeknik KP Bone

Dalam upaya mendukung visi, misi dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka peran Politeknik KP Bone adalah menghasilkan dan meningkatkan SDM kelautan dan Perikanan sebagai asset Negara yang mampu mengelola bisnis kelautan dan perikanan berbasis Iptek yang relevan dan inovatif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, maka pengembangan Politeknik KP Bone diarahkan menuju pada terbentuknya suatu lembaga pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang mampu :

- Menjadikan pusat Pendidikan Vokasi di bidang kelautan dan perikanan dan sebagai pengembang produk inovasi yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan pendidikan tinggi dan industri bertaraf internasional;
- Selalu berusaha mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Mengembangkan diri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara berupa penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi kelautan dan perikanan baru yang membawa kemaslahatan masyarakat;
- Meningkatkan mutu lulusan melalui pengelolaan mutu pendidikan dan lembaga yang efektif dan efisien;
- Meningkatkan manajemen mutu pendidikan kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan standar layanan minimum secara konsisten dan terus-menerus; dan
- Mengembangkan sarana prasarana untuk memenuhi tuntutan perubahan ilmu dan teknologi secara global.

1) Strategi Pengembangan

Selanjutnya dalam upaya mendukung arah kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, maka strategi pengembangannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di Politeknik KP Bone;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan, kapasitas, serta kualitas pendidikan di Politeknik KP Bone;
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pendekatan *Teaching Factory* dibidang kelautan dan perikanan;

4. Mengembangkan kurikulum, tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana di Politeknik KP Bone yang berstandar Internasional;
5. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;
6. Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik Kelautan dan Perikanan;
7. Memperkuat jejaring termasuk melibatkan pemangku kepentingan untuk pengembangan pendidikan; dan
8. Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan.

2) Program Pengembangan

Strategi pengembangan agar dapat berjalan, maka perlu didukung oleh program pengembangan. Adapun program pengembangan Politeknik KP Bone adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan dinamika perkembangan Iptek dan kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang berwawasan luas dan menguasai teknologi di bidangnya;
- b. Mewujudkan *teaching factory* akuakultur, *teaching factory* pengolahan, mesin dan kapal latih yang efektif, berteknologi maju, dan tata kelola bisnis yang ekonomis;
- c. Mengelola sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung kegiatan pembelajaran;
- d. Mengelola administrasi yang mengacu pada ISO, dengan menggunakan sistem elektronik;
- e. Mengelola sarana dan prasarana asrama taruna dan unit pendukung lainnya;
- f. Melaksanakan penelitian terapan yang relevan dan terjangkau, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kelautan dan perikanan;
- g. Melaksanakan penelitian permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat sekaligus memberikan solusinya;

- h. Melaksanakan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Perusahaan, untuk mengembangkan teknologi dan memberdayakan masyarakat;
- i. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, baik nasional maupun internasional;
- j. Menjalinkan kerjasama dengan industri dan UKM; dan
- k. Menjalinkan kerjasama dengan unit kerja lain terkait dan Pemerintah Daerah.

E. Kerangka Regulasi

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik KP Bone memerlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembuatan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur penyelenggara organisasi. Dalam Rencana Strategis Politeknik KP Bone 2020 – 2024, kerangka regulasi yang disiapkan mengacu kepada program regulasi nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Rencana Strategis Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pusat Pendidikan KP yang meliputi :

1. Peraturan Menteri KP Nomor 8/PERMEN-KP/2015 tentang Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri KP Nomor 47/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone;
3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Sumber Daya Manusia Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Kelautan dan Perikanan.
4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan.

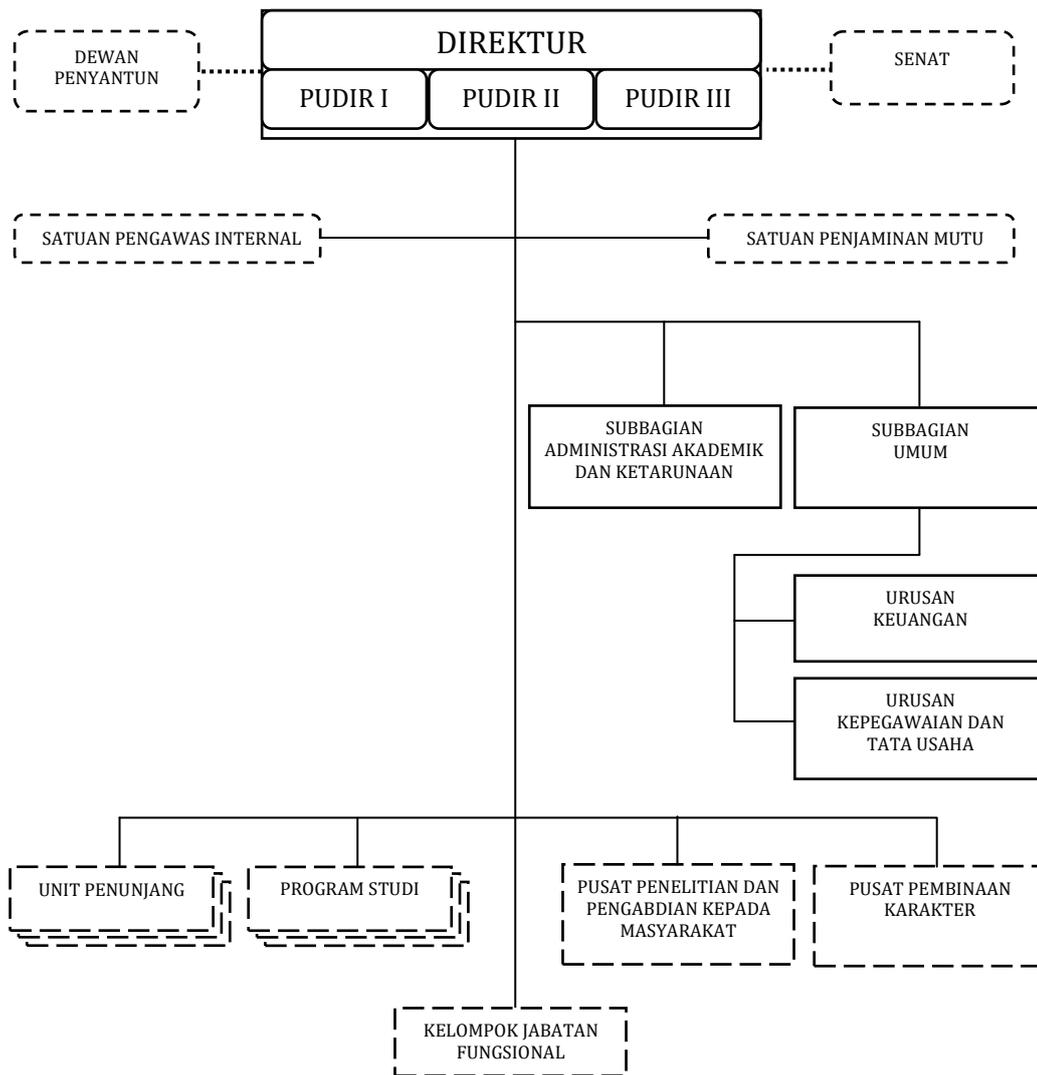
5. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan Jangka Pendek;
6. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penetapan Rencana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
7. Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Kurikulum Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan;
8. Perubahan Permen KP tentang Statuta Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Bone;

F. Kerangka Kelembagaan

Renstra KKP Tahun 2020 – 2024 menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
2. Mandat yang diberikan meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses (*Business Process Management*) pembangunan kelautan dan perikanan.
5. Penguatan mutu kelembagaan satuan pendidikan KP

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik KP Bone, maka Struktur Organisasi Politeknik KP Bone adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Struktur Organisasi Politeknik KP Bone

Politeknik KP Bone melaksanakan Program Pendidikan Diploma III yang saat ini memiliki 3 Program Studi yaitu :

1. Program Studi Perikanan Tangkap;
2. Program Studi Budidaya Ikan; dan
3. Program Studi Teknologi Kelautan.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Pusat Pendidikan KP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP Tahun 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Persentase lulusan yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	75	75	75
		2	Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	5	10	15	17	19
		3	Desa mitra pendidikan KP yang meningkatkan kompetensinya (Desa)	1	1	1	1	1
		4	Lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi (Orang)	2.450	2.479	2.735	2.579	2.996
		5	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	8.171	8.308	8.668	8.843	9.068
		6	Sarana dan prasarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	21	17	17	17	17
		7	Jejaring dan/atau kerjasama pendidikan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (Dokumen)	22	34	34	34	34
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)	50	55	60	65	75
		9	Jumlah lembaga pendidikan terstandard (Lembaga)	10	17	17	17	17
		10	Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya (Orang)	343	355	360	365	370

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
		11	Pengabdian pendidikan tinggi KP (Paket)	17	17	17	17	17
		12	Aparatur KKP yang ditingkatkan jenjang pendidikan formalnya (Orang)	180	180	235	240	250
		13	Dokumen perencanaan kegiatan pendidikan KP yang tersusun sesuai kaidah yang berlaku (Dokumen)	50	50	50	50	50
		14	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP (Nilai)	80	80	80	80	80
2	Tata kelola Pemerintahan yang baik	15	Indeks Profesionalitas ASN Pendidikan KP (Indeks)	72	72	72	72	72
		16	Persentase unit kerja pendidikan KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	82	82	82	82
		17	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran pendidikan KP (Nilai)	Baik (88)				
		18	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran Pendidikan KP TA 2019	1%	1%	1%	1%	1%
		19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pusat Pendidikan KP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	60	60	60	60
		20	Nilai kinerja anggaran pendidikan KP (Nilai)	85	85	85	85	85

2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Politeknik KP Bone disusun mengacu pada Indikator Kinerja Pusat Pendidikan KP Tahun 2020-2024. Rincian Indikator Kinerja Politeknik KP Bone Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Politeknik KP Bone
Tahun 2020-2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP	1	Persentase lulusan Politeknik KP Bone yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	75	75	75	75	75
		2	Persentase lulusan Politeknik KP Bone yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	5	10	15	17	19
		3	Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya (Desa)	-	1	1	1	1
		4	Lulusan Politeknik KP Bone yang bersertifikat kompetensi (Orang)	82	56	112	250	246
		5	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di Politeknik KP Bone (Orang)	429	788	951	1015	1015
		6	Sarana dan prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya Politeknik KP Bone (Unit)	1	0	1	1	1
		7	Jejaring dan/atau kerjasama Politeknik KP Bone yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (Dokumen)	1	1	1	1	2
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik di Politeknik KP Bone (%)	50	55	60	65	75
		9	Pendidik dan tenaga kependidikan Politeknik KP Bone yang meningkat kompetensinya (Orang)	12	12	12	12	12
		10	Pengabdian pendidikan tinggi KP di Politeknik KP Bone (Paket)	1	1	1	1	1
		11	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di Politeknik KP Bone (Nilai)	80	80	80	80	80
2	Tata kelola Pemerintahan yang baik	12	Indeks Profesionalitas ASN Pendidikan KP (Indeks)	72	72	72	72	72
		13	Persentase unit kerja pendidikan KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	82	82	82	82
		14	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran pendidikan KP (Nilai)	Baik (88)				
		15	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran Pendidikan KP	1%	1%	1%	1%	1%
		16	Nilai kinerja anggaran pendidikan KP (Nilai)	85	85	85	85	85

2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan penyelenggaraan Program Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone tahun 2020-2024, berasal dari Badan Riset dan Sumberdaya Manusia KP, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Renstra yang mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2020-2024 dan PNBPN Tahun 2020-2024. Porsi Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya untuk membiayai Program Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone tahun 2020-2024 melalui Pusat Pendidikan KP.

BAB V

PENUTUP

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. Hal tersebut untuk mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan yang sedang dilaksanakan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan KP akan berjalan dengan lancar jika dilaksanakan oleh tenaga yang professional dan kompeten di bidangnya.

Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen yang disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis Pusat Pendidikan KP yang secara berjenjang merupakan penjabaran Rencana Strategis Badan Riset dan Sumberdaya Manusia KP dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini disusun untuk memetakan dan menjawab berbagai persoalan dan tantangan serta dinamika yang terjadi sepanjang tahun 2020 - 2024. Namun demikian, mengingat dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin ada hal-hal yang belum terakomodasi. Untuk mengatasinya, review terhadap Restra sebagai upaya penyempurnaan format kebijakan dan dukungan kegiatan sangat dimungkinkan, agar pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone selama Tahun 2020 – 2024 dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Lampiran II
 Peraturan Direktur Politeknik KP Bone
 Nomor 065/BRSDM-POLTEK.BN/ RC.221/V/2020
 Tentang Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan
 Perikanan Bone Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat KP sesuai kebutuhan	1	Persentase lulusan Politeknik KP Bone yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	%	75	75	75	75	75
		2	Persentase lulusan Politeknik KP Bone yang melakukan rintisan wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (%)	%	5	10	15	17	19
		3	Desa mitra pendidikan KP yang meningkat kompetensinya (Desa)	Desa	-	1	1	1	1
		4	Lulusan Politeknik KP Bone yang bersertifikat kompetensi (Orang)	Orang	82	56	112	250	246
		5	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di Politeknik KP Bone (Orang)	Orang	429	788	951	1015	1015
		6	Sarana dan prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya Politeknik KP Bone (Unit)	Unit	1	1	1	1	2
		7	Jejaring dan/atau kerjasama Politeknik KP Bone yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti (Dokumen)	Dokumen	1	1	1	1	2
		8	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik di Politeknik KP Bone (%)	%	50	55	60	65	75

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	
		8	Pendidik dan tenaga kependidikan Politeknik KP Bone yang meningkat kompetensinya (Orang)	Orang	12	12	12	12	12
		9	Pengabdian pendidikan tinggi KP di Politeknik KP Bone (Paket)	Paket	1	1	1	1	1
		10	Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di Politeknik KP Bone (Nilai)	Nilai	80	80	80	80	80
	2	11	Tata kelola Pemerintahan yang baik pada Politeknik KP Bone	Indeks	72	72	72	72	72
		12	Indeks Profesionalitas ASN Pendidikan KP (Indeks)	%	82	82	82	82	82
		13	Persentase unit kerja pendidikan KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Nilai	Baik (88)				
		14	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran pendidikan KP (Nilai)	%	1%	1%	1%	1%	1%
		15	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pendidikan KP dibandingkan realisasi anggaran Pendidikan KP TA 2019 (%)	Nilai	85	85	85	85	85
			Nilai kinerja anggaran pendidikan KP (Nilai)						

Lampiran III
 Peraturan Direktur Politeknik KP Bone
 Nomor 065/BRSDM-POLTEK.BN/RC.221/V/2020
 Tentang Rencana Strategis Politeknik Kelautan
 dan Perikanan Bone Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA OUTPUT POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

KEGIATAN	SASARAN OUTPUT		INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
					2020	2021	2022	2023	2024	
Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	1	Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	Orang	259	462	517	532	532
	2	Pengabdian Pendidikan Tinggi KP	2	Jumlah Pengabdian Pendidikan Tinggi KP (paket)	Paket	1	1	1	1	1
	3	Sarana dan Prasarana Pendidikan KP	3	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan KP (unit)	Unit	1	1	1	1	1
	4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	4	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker (layanan)	Layanan	1	1	1	1	1
	5	Layanan Perkantoran	5	Jumlah Layanan Perkantoran (layanan)	Layanan	1	1	1	1	1
			6	Gaji dan Tunjangan (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12

KEGIATAN	SASARAN OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
		7 Operasional dan Pemeliharaan Kantor (bulan)	Bulan	12	12	12	12	12



21 Mei 2020
Direktur,

Muji Prihajatno, S.Pd, M.Eng
NIP. 19830114 200604 1 001